DILEMA BEA KELUAR

- Bea keluar emas baru dikenakan pada emas mentah, konsentrat, *dore bullion*, tetapi tidak pada emas batangan/perhiasan.
- Realisasi ekspor batu bara sedang dalam tren meningkat.
- Harga emas ada di level yang tinggi, karena berbagai sentimen ketidakpastian di kawasan.

Realisasi Penerimaan Negara dari Minerba (Rp Triliun)

M. Ryan Hidayatullah & Dionisio D. Tonce
redaksi@bisnis.com

Tekanan terhadap sektor mineral dan batu bara nasional tidak kunjung reda di tengah fluktuasi harga dan peningkatan biaya operasional. Terkini, pelaku usaha pertambangan emas dan batu bara kembali waswas terhadap rencana perluasan objek bea keluar ke kedua komoditas itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan rasio perpajakan.

Pelaku usaha pertambangan mineral menyatakan pengenaan bea keluar untuk emas dan batu bara bakal menambah beban biaya operasional perusahaan. Meski masih dikaji, tetapi pemerintah telah memastikan upaya untuk mengerek pendapatan negara itu bakal berlaku pada tahun depan, dengan besaran yang fleksibel mengikuti perkembangan harga di pasar.

Ekspor Barang Perhiasan & Barang Berharga
(US$ Miliar)

2019	1,95
2020	1,46
2021	2,58
2022	3,81
2023	5,60
2024	5,5

Ekspor Batu Bara
(Juta Ton)

2019	454,5	2023	406,67
2020	331,94	2024	440,85
2021	322,07	2025*	192,75
2022	367,94		

*year-to-date

Sumber: Kementerian ESDM, BPS

Save & Share

BISNIS/WIN CAHYONO

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, sebelum mengimplementasikan bea keluar untuk emas dan batu bara, pemerintah perlu berdiskusi dengan pelaku usaha.

Dia memahami negara sangat membutuhkan tambahan penerimaan negara di tengah kondisi perekonomian dunia yang dilanda ketidakpastian. Akan tetapi, keberlangsungan kegiatan usaha sektor pertambangan yang selama ini masih menjadi salah satu sektor andalan perekonomian negara juga perlu dijaga.

"Kenaikan biaya operasional makin membebani di tengah turunnya harga komoditas. Pelaku usaha pertambangan minerba, termasuk yang mengupayakan komoditas batu bara dan emas baru dikenakan tarif royalti baru di akhir April 2025," kata Hendra kepada *Bisnis*, Selasa (15/7).

Bagi emiten, wacana yang digulirkan oleh DPR dan pemerintah itu berisiko menekan daya saing ekspor, serta margin keuntungan di sektor pertambangan.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata memandang bahwa penerapan skema fleksibel berpotensi membuat harga jual komoditas Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing, seperti Australia, Afrika Selatan, dan Rusia.

Alasannya, ketika harga tinggi dan bea keluar berlaku, biaya ekspor akan meningkat, sehingga margin menurun. Pembeli pun bisa beralih, terutama untuk pasar yang sensitif terhadap harga seperti India, China dan negara berkembang.

"Daya saing global terancam saat harga sedang tinggi, ketika seharusnya margin ekspor optimal," ujar Liza saat dihubungi.

Data Volume Produksi dan Penjualan Emas Merdeka Copper Gold (MDKA) pada 2020 - 2024

Dari sisi pasar modal, kebijakan tersebut berpotensi memberikan sentimen negatif bagi sejumlah emiten eksportir murni, seperti PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA).

Keempat emiten tersebut, kata Liza, mengandalkan 70% hingga 100% penjualannya dari pasar ekspor. Alhasil, bea keluar akan menambah beban margin, serta berisiko menurunkan volume ekspor dan laba bersih.

Sebaliknya, emiten dengan orientasi domestik atau hilirisasi seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) dinilai lebih tahan terhadap dampak rencana kebijakan bea keluar.

"BRMS menjual seluruh produknya ke smelter domestik milik sendiri, sehingga dampak bea keluar sangat minim," ucap Liza.

KETIDAKPASTIAN

Dari sisi investor, Liza menyatakan skema fleksibel justru menambah ketidakpastian regulasi. Mengingat mekanisme ini cenderung sulit diprediksi dan meningkatkan volatilitas dalam valuasi.

"Investor mungkin memasukkan *'regulatory risk premium'* terhadap emiten ekspor yang rawan terkena bea keluar, apalagi jika dasar pengenaan dan waktu pemberlakuan tidak konsisten," ujar Liza.

Dihubungi terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai fleksibilitas dalam pengenaan bea keluar sebaiknya dikaji lebih dalam agar bisa disesuaikan dengan kondisi pasar.

Hal itu dikarenakan rata-rata harga jual (*average selling price*/ASP) sejumlah komoditas tengah mengalami penurunan dalam beberapa kuartal terakhir.

Meski demikian, tenggat implementasi pada 2026 memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bersiap. Dengan persiapan optimal, kebijakan ini justru bisa menjadi katalis untuk memperkuat struktur industri dalam negeri ke depan.

Secara terpisah, Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Niko Chandra menyatakan implementasi bea keluar akan berdampak pada struktur biaya pokok penjualan dan berpotensi memengaruhi daya saing batu bara Indonesia di pasar global.

"Hal ini berpotensi memengaruhi daya saing batu bara Indonesia di pasar global dan dapat berdampak pada volume ekspor, tergantung pada besaran tarif yang ditetapkan."

Menurutnya, emiten tambang pelat merah yang tercatat di BEI sejak 2002 itu akan terus melakukan analisis dan penyesuaian strategi guna menjaga kinerja serta keberlanjutan usaha di tengah dinamika regulasi.